

Kandidat Perempuan dan Tantangan Politik Patronase pada Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Benediktus Dalupe

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak: Artikel ini menggambarkan usaha calon legislatif (caleg) perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pemilihan umum 2019 di tengah maraknya patronase. Politik patronase menjadi kendala utama bagi perempuan. Mereka diperhadapkan pada situasi yang mengharuskan patronase dalam meraih dukungan. Pengalaman politik dan nomor urut menunjang pencalonan perempuan. Meski itu penting, uang menjadi sangat vital dalam pencalonan. Biaya dalam jumlah besar diperlukan untuk pengadaan alat peraga kampanye, operasional pribadi dan tim, biaya bantuan ke pemilih, hingga biaya pengawalan suara pada hari pemilihan. Tuntutan patronase merupakan situasi yang dilematis bagi sebagian caleg perempuan. Mereka tidak lagi menonjolkan agenda politik perempuan dalam kampanye mereka. Pemilih lebih merespons isu-isu konkret dan bantuan material yang mungkin diperoleh dari caleg. Para caleg perempuan membutuhkan pendanaan, jaringan personal dan kekerabatan, yang mayoritas dimonopoli laki-laki. Tanpa itu semua, begitu sulit bagi perempuan untuk terpilih.

Kata kunci: Keterpilihan, Kandidat Perempuan, Patronase, Pemilu 2019, NTT

Abstract: This Article describes about hard efforts of woman candidates for winning the 2019 legislative elections in East Nusa Tenggara, Indonesia. Patronage is the main obstacle for woman. Patronage is the chief mechanism that legislative candidates used to appeal to voters. Many scholars and observers are still focused on money politics, patronage, and clientelism are being dominated in electoral life of Indonesia. My findings confirmed that political experience and list position supported for woman at their campaign. But that are not enough. A Lot of money must be needed for taking campaign tools, operational cost, patronaging and protecting the votes from manipulation. Patronage demands gave them dilemma situation. The consequences, they do not to highlight woman issues for getting votes. The voters mostly like money, goods and material helps from candidates. Woman candidates obviously need funds, personal network, and patronage that mostly dominated by men. Without these, totally difficult by woman for winning the competition.

Key words: Legislative Elections, Woman Candidate, Patronage, NTT-Indonesia

Koresponden Penulis:

Benediktus Dalupe, Program Studi Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, DKI Jakarta 14350

E-mail: dalupebene@gmail.com

PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk memetakan tantangan dan usaha kandidat perempuan dalam menghadapi politik patronase pada pemilihan umum (pemilu) 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kandidat perempuan menghadapi tantangan sistemik dan praktis yang jauh lebih besar dan lebih sulit dalam usaha mereka memasuki lembaga politik melalui pemilu. Berkaca pada hasil Pemilu 2019, ada peningkatan representasi perempuan. Di legislatif nasional (DPR-RI) misalnya, perempuan menguasai 118 kursi atau 20,52 persen dari total 575 kursi yang tersedia. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilu 2014 yang hanya berjumlah 97 orang (17,32%). Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi di lembaga legislatif daerah (DPRD) Provinsi NTT. Dari 65 kursi yang tersedia, sebanyak 12 orang perempuan terpilih (18,47 %) yang mana 2014 hanya berjumlah 7 orang (10,77 %).

Meski ada tren peningkatan, representasi perempuan di parlemen masih sulit mencapai 30 persen sebagaimana yang diharapkan. Padahal jumlah populasi perempuan adalah setengah dari total populasi nasional. Selama kuota 30% tidak terpenuhi, maka tidak ada efek signifikan dari keterwakilan perempuan pada kesejahteraan perempuan (Halimatusa'diyah, 2019). Studi yang dilakukan Prihatini (2019) menemukan bahwa caleg perempuan yang terpilih masih belum mewakili mayoritas perempuan yang ada di Indonesia, terutama dari aspek kelas sosial-ekonomi dan kerabat politik yang berbeda. Keekerabatan dan dinasti politik menjadi aspek penentu dalam pencalonan perempuan. Selain itu keterpilihan perempuan sangat terkait pengalaman dalam jabatan politik, usia dan juga nomor urut dalam daftar calon. Caleg perempuan yang memperoleh nomor urut kecil seperti nomor urut 1 misalnya, memiliki viabilitas yang lebih besar untuk terpilih.

Upaya untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen telah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalamnya mewajibkan partai politik (parpol) untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi agar parpol bisa mengikuti pemilu. Lebih teknis Pasal 55 ayat (2) mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Meski membawa harapan bagi peningkatan representasi perempuan, UU yang menandai dimulainya sistem proporsional daftar terbuka ini menyediakan persoalan baru. Sejumlah studi menjelaskan bahwa sistem ini menyediakan problem tersendiri terutama bagi perempuan. Sistem ini memicu merajalelanya politik uang dan manipulasi perhitungan suara menjadi sandungan bagi semua kandidat. Sistem ini meningkatkan ketidakpastian dan memicu biaya kampanye yang besar. Karena itu praktik pembelian suara (*vote buying*) dan integritas pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi pencalonan perempuan. Karena itu perempuan memerlukan dukungan penuh dari suami atau ayah dan keluarga mereka dalam pencalonan yang membantu mereka mendapat sokongan finansial dan kemudahan untuk mendekati para pemilih (Prihatini, 2019).

Sistem proporsional terbuka memicu meluasnya praktik patronase dalam pemilu di Indonesia. Aspinall (2014b) melihat bahwa sistem daftar terbuka (proporsional terbuka) telah menggeser dominasi kampanye partai ke perlunya jaringan personal yang kuat dengan pemilih. Perubahan ini telah mengubah pandangan pemilih dalam melihat perwakilan politik mereka. Mereka tidak lagi menganggap penting program partai dan kebijakan nasional. Sebaliknya pemilih fokus pada apa yang mereka bisa dapatkan secara nyata bagi diri mereka atau komunitas mereka. Situasi ini menjadi latar belakang bekerjanya patronase. Pemberian material dan pembelian suara menjadi marak di masa kampanye. Para kandidat bersaing dengan berbagai strategi dan taktik untuk meningkatkan perolehan suara pribadi. Mereka tidak saja bersaing dengan kandidat dari partai lain, tetapi juga rekan separtai.

Di samping persoalan sistem pemilu (struktural), ada persoalan kultural yang juga berpengaruh bagi akses perempuan ke politik. Di NTT, perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua. Mereka dinilai tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke ranah politik yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki (Jovani, 2018). Di dalam budaya patriarki, kaum laki-lakilah yang terbiasa bersolisasi, sementara perempuan terdomestifikasi. Kaum laki-lakilah yang memiliki waktu jauh lebih banyak di luar rumah. Panggung sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan tidak mudah berjalan sendirian, sebagaimana terbiasa bagi laki-laki. Meski demikian, menurut Hillman (2017) hal ini dinilai bukan faktor determinan dalam memengaruhi fluktuasi representasi numerik

perempuan di parlemen. Faktor-faktor kelembagaan sistem pemilu, menjadi hambatan yang lebih nyata bagi perempuan.

Keterpilihan 12 orang perempuan di DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2019 tercatat sebagai representasi tertinggi sejauh ini. Dari 12 orang itu, dua menduduki jabatan pimpinan DPRD, yaitu sebagai ketua dan wakil ketua. Studi ini akan melihat potret di balik keterpilihan caleg perempuan provinsi NTT pada pemilu 2019. Dengan sistem pemilu yang sarat biaya dan ketidakpastian, perempuan diharuskan untuk bersaing ketat agar dapat terpilih. Di dalam proses kampanye mereka diharuskan untuk menggunakan strategi yang tepat, memaksimalkan sumber daya politik yang ada, dan menyiasati menguatnya praktik patronase sebagai kecenderungan umum pemilu di Indonesia.

Riset kualitatif ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada empat caleg perempuan yang terpilih. Mereka berasal dari 4 daerah pemilihan (dapil) yang berbeda yaitu Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos (dapil 1), Jimur Siena Katrina (dapil 4) Angela Mercy Piwung, SH (dapil 5), Reny Marlina Un, SE, MM (dapil 8). Data lainnya seperti profil, *background* kandidat, data pemilu diperoleh dan diolah penulis dari berbagai sumber dan pengalaman observasi lapangan pada Pemilu 2019.

Patronase, Klientelisme dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia

Tidak berlebihan bila sejumlah ahli politik dari luar negeri (Indonesianis) melabeli politik Indonesia pasca Soeharto dengan term patronage (patronase). Istilah ini menjadi semakin umum, ketika praktik ini makin menguat dalam demokrasi elektoral. Aspinall (2013) menggambarkan bahwa distribusi patronase yang terjadi dimana-mana sebagai cara untuk memperkuat afiliasi politik dan model kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Di Indonesia praktik patronase, seperti politik uang punya akar yang kompleks. Orde baru menggunakan patronase untuk mengikat para aktor politik utama ke pusat kekuasaan. Namun praktik patronase antara politisi dan pemilih yang marak dalam pemilu dapat dilacak sejak Indonesia menerapkan sistem proposional daftar terbuka (*open-list Proportional*). Terjadi pergeseran kepada menguatnya personalisme calon (Aspinall 2014b). Allen (2015) mencatat ketika nasib politik bergantung pada suara pribadi, para kandidat kemudian berjanji untuk memberikan manfaat klientelistik kepada pemilih. Praktik ini menuntun kandidat dan pemilih menjalin hubungan patron-klien yang langgeng.

Aspinall dan Sukmajati (2015) secara detail telah menghimpun studi-studi terkait patronase pada Pemilu 2014. Modus operandi yang mereka rumuskan banyak menjelaskan bentuk-bentuk patronase yang umum terjadi dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Studi mereka menjelaskan secara konseptual apa yang disebut sebagai “politik uang” dalam pemilu di Indonesia, yaitu praktik distribusi uang (*cash*) dan barang kebutuhan (*goods*) kepada pemilih dalam masa pemilu. Keduanya menggunakan *term* patronase dan klientelisme untuk menjelaskan praktik tersebut. Dalam *term* ilmu sosial banyak ilmuwan menyamakan kedua istilah tersebut. Aspinall dan Sukmajati merujuk defenisi Martin Shefter (1994) yakni patronase sebagai ‘sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka’. Secara rinci mereka menuliskan defenisi patronase sebagaimana ditemukan dalam karya mereka:

“Patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok atau komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara), atau dari dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah)” (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 4).

Aspinall dan Sukmajati menyebutkan beberapa variasi dari bentuk patronase dalam Pemilu 2014. Pertama, pembelian suara (*vote buying*), yang dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih, secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Kedua, pelayanan dan aktivitas (*service and activities*). Kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas atau pelayanan untuk pemilih (misalnya turnamen olahraga dan pemeriksaan kesehatan gratis). Ketiga, barang-barang kelompok (*club goods*), yaitu berupa pemberian bantuan/ donasi kepada komunitas, seperti bantuan kepada klub olahraga dan kelompok agama. Keempat, proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*) yaitu proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu.

Mayoritas kandidat memanfaatkan tim sukses mereka untuk membagikan uang tunai kepada pemilih yang ditargetkan. Banyak kandidat yang percaya bahwa pemilih akan mendukung mereka yang memberi uang di menit-menit terakhir. Meski para kandidat juga sering ditipu oleh para tim sukses yang mereka percayai untuk mendistribusikan uang kepada pemilih. Untuk mengantisipasi ini, para kandidat menyuap penyelenggara pemilu untuk bisa memanipulasi perhitungan suara. Bahkan seorang kandidat dapat membeli suara dan atau memindahkan suara milik rekan separtai dengan menyuap operator perhitungan suara (Aspinall 2015). Kesimpulan yang hampir sama juga diberikan oleh Aminuddin dan Attamimi (2019), bahwa politik uang berkaitan dengan kemunculan pemilih pragmatis-rasional, keterlibatan oligarki partai dan hubungan rahasia dengan penyelenggara pemilu. Para kandidat harus berusaha maksimal untuk memastikan dukungan pemilih. Hal ini berkonsekuensi pada peningkatan biaya politik.

Shin (2015) mengemukakan temuan menarik terkait relasi patronase di Indonesia. Dua perspektif soal manakah yang lebih dominan antara penawaran dari politisi atau permintaan dari pemilih. Satu pihak meyakini bahwa patronase tetap ada karena pemilih yang miskin cenderung menginginkan barang/pemberian personal dari pada kebijakan. Sementara pihak yang lain berfokus pada penawaran bahwa hanya sedikit politisi yang menawarkan kebijakan, sehingga pemilih tidak memiliki pilihan selain memilih politisi yang mendistribusikan patronase. Shin (2015) sendiri menemukan bahwa ketika ditawarkan patronase dan kebijakan, pemilih miskin yang kurang terdidik cenderung menuntut patronase, seperti pekerjaan dan uang, dari pada kebijakan umum yang bersifat nasional. Sementara itu orang kaya dan yang berpendidikan lebih menyukai kebijakan nasional.

Pola di atas secara gamblang menyulitkan kaum perempuan jika mereka harus berjuang sendirian. Jika tanpa pengalaman politik dan jaringan pribadi (sosial dan politik) ditambah pendanaan yang minim, betapa sulit bagi mereka untuk menggapai kemenangan elektoral. Dettman, Pepinsky, Pierskalla (2017) mempelajari hubungan antara jabatan, nomor urut, karakteristik kandidat dan keberhasilan dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Mereka menemukan bahwa petahana selalu unggul dalam kontestasi. Hal ini disebabkan oleh pilihan partai dalam menentukan nomor urut, di mana petahana diberi nomor urut pertama, yang memudahkan mereka untuk dipilih.

Secara umum dilihat bahwa kebijakan afirmatif (*quota*) 30 persen membawa angin positif bagi peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Pemberlakuan kuota dan aturan penempatan perempuan dalam daftar tidak diragukan lagi membantu meningkatkan pencalonan perempuan di Indonesia pada Pemilu 2009. Namun hal itu sendiri tidak cukup untuk menjelaskan kenaikan representasi perempuan yang terpilih mengingat kendala institusional dalam sistem di Indonesia (Rosenfield 2012). Sementara itu keberhasilan kuota gender dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk sifat sistem politik, jenis sistem pemilihan, jenis sistem kuota yang diadopsi, sikap budaya terhadap peran perempuan dalam masyarakat dan sifat lingkungan parlementer itu sendiri (McCann, 2013).

Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilu punya dampak terhadap perkembangan representasi perempuan di lembaga politik. Sistem perwakilan proporsional memberi daya dukung yang lebih baik dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam politik (Thames, 2016, Paxton et.al, 2010). Penerapan proporsional campuran (*mixed member proportional/MMP*) misalnya terbukti meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen (Johnson-Myers 2017). Sistem campuran ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari Burhanuddin Muhtadi (2020) untuk mengatasi maraknya politik uang di Indonesia.

Di luar aspek sistem pemilu, hambatan budaya harus diakui menyulitkan perempuan di banyak tempat untuk bersaing dalam pemilu. Bahkan banyak partai kesulitan mencari perempuan yang mumpuni untuk masuk dalam daftar caleg mereka. Banyak yang kemudian menjadikan perempuan sebagai pelengkap agar memenuhi syarat 30 persen demi tidak diberi sanksi oleh komisi pemilihan umum (KPU).

Prihatini (2018) menemukan bahwa mayoritas laki-laki percaya bahwa hambatan terbesar dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik berawal dari sulitnya partai untuk menarik perempuan yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Dua faktor yang bertanggung jawab untuk hal ini adalah perempuan memprioritaskan keluarga daripada karier politik dan kendala budaya, agama dan sosial yang membuat perempuan kurang diinginkan sebagai pemimpin. Sementara itu, nilai-nilai sosial dan adat istiadat yang didominasi pemimpin laki-laki paling merugikan nominasi politik perempuan. Berikutnya adalah kurangnya pelatihan (pendidikan) politik perempuan, modal sosial yang tidak mencukupi, dan dana yang tidak mencukupi untuk menjalankan kampanye.

Aspek kelembagaan politik masih terus membatasi perempuan untuk menang dalam kontestasi pemilu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem daftar terbuka meningkatkan ketidakpastian, memicu biaya kampanye yang besar. Praktek pembelian suara dan integritas pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan (Prihartini, 2019). Di tengah situasi politik yang demikian, perempuan tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Mereka juga sulit untuk menonjolkan kepentingan politik perempuan yang spesifik di dalam kampanye mereka. Studi lapangan ini akan melihat sejauh mana perempuan melewati kampanye yang tidak mudah dan berhasil terpilih.

Investasi Sosial, Dukungan Keluarga dan Pengalaman Politik

Investasi sosial menjadi penting dalam kontestasi politik. Investasi sosial yang dimaksud adalah relasi sosial yang baik dan perbuatan baik atau terpuji yang telah dilakukan bagi masyarakat. Istilah ini lebih menjelaskan jasa sosial seseorang di dalam masyarakat apakah itu dalam rangka tugas (*duty*) atau kesukarelaan.

Setidaknya inilah modal awal bagi Angela Mercy Piwung (Mercy) dan Jimur Siena Katarina (Siena) yang memudahkan mereka dalam bersosialisasi. Mercy merupakan salah satu petahana yang terpilih kembali pada pemilu 2019. Ini adalah kali ketiga baginya menjadi anggota DPRD NTT mewakili dapil 5 (Kabupaten Ngada, Nagakeo, Ende, Sikka). Menariknya tiga kali pencalonan yang berhasil ini dilalui dengan tiga partai politik yang berbeda.

Ketika pertama kali menjadi caleg, Mercy berstatus sebagai ibu rumah tangga. Pada pemilu 2009 Mercy mencalonkan diri melalui partai PKPB, 2014 melalui partai Hanura dan 2019 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mercy satu-satunya perempuan yang terpilih 3 periode berturut-turut. Mercy menjelaskan bahwa perbuatan baik sang Ayah sebagai seorang mantri (petugas kesehatan/perawat) pada masa lampau memudahkan ia dalam bersosialisasi ketika menjadi caleg. Perbuatan baik sang Ayah tersebut masih diingat masyarakat.

“yang membuat saya berhasil itu salah satu faktor adalah bagaimana orang tua saya. Investasi sosial orang tua saya itu luar biasa. Saya hadir di tengah masyarakat itu karena orang tua juga. Bukan karena pribadi saya. Karena begitu saya turun (sosialisasi) mereka (masyarakat) tahu bahwa itu (saya) bapak punya anak.” (Wawancara Angela Mercy Piwung, 5 Februari 2020).

Mercy terjun ke politik dengan dukungan penuh suami dan memulai keterlibatannya dalam politik praktis dengan sosialisasi di dapilnya. Pada pemilu 2019, perolehan suara Mercy sebagai pendatang baru di partai PKB mengungguli Yucun Lepa yang merupakan ketua partai tingkat provinsi dan sekaligus sebagai petahana.

Caleg perempuan lain yang terpilih, Siena Katarina awalnya tak berminat menjadi caleg. Ia pernah merasakan susah mencari dukungan politik dan membesarkan sebuah partai. Ia mendampingi sang suami sebagai politisi Partai Amanat Nasional. Laurens Bahang Dama (meninggal 2014) adalah politisi PAN yang sudah dikenal luas masyarakat Manggarai. Berangkat dari latar belakang sebagai pengusaha, Laurens terpilih sebagai anggota DPR-RI dari dapil 1 NTT pada pemilu 2009. Akibat dorongan terus menerus dari petinggi PAN, Siena akhirnya memutuskan untuk maju sebagai caleg DPRD Provinsi pada pemilu 2019.

“Pengaruh bapa Laurens itu masih besar. Orang kenal saya juga. Saya juga belajar dari bapak Laurens” (Wawancara Siena Katarina 5 Februari 2020).

Usahanya merebut dukungan terbilang berat, karena pesaing utamanya di internal partai adalah petahana Yeni Veronika yang merupakan istri dari bupati aktif kabupaten Manggarai, Deno Kamelus. Hasil pemilu menempatkan PAN sebagai juara di dapil 4 (Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur) untuk perolehan suara legislatif tingkat provinsi.

Dari dapil 1, Kota Kupang, caleg perempuan terpilih Adoe Yuliana Elisabeth (Lily) mengisahkan prosesnya yang panjang hingga baru terpilih pada pemilu 2019. Sejak 1999 dengan latar belakang sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kupang, Lily kemudian bergabung sebagai kader PDIP Provinsi NTT dan menjadi pengurus hingga saat ini. Ia pertama kali mencoba peruntungannya dalam Pemilu 2004. Namun Pemilu 2004 bukan saja menjadi kegagalannya yang pertama dan terakhir. Lily juga gagal pada pemilu 2009 dan 2014.

Sementara itu Reny Marlina Un (Reny), caleg perempuan terpilih dari dapil 8 (Kabupaten Timor Tengah Selatan/TTS) pada pemilu 2019 merasakan ada kemudahan sebagai petahana dibanding sebagai caleg pendatang baru pada 2014. Reny maju pertama kali pada pemilu 2014 setelah dilamar partai Demokrat dan mendapat nomor urut satu. Perolehan suaranya berada di perikat dua dan belum berhasil untuk terpilih. Pada tahun 2018, Reny menjadi anggota DPRD NTT dengan status pergantian antar waktu (PAW), setelah rekannya yang terpilih pada 2014 mundur untuk pencalonan

bupati. Reny kemudian ditempatkan pada nomor urut 1 pada pemilu 2019 dan berhasil terpilih.

Tabel 1 Caleg Perempuan Terpilih dan Latar Belakang Hasil Pemilu 2019

Nama Caleg	Background
Adoe Yuliana Elisabeth S.Sos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurus DPD PDIP NTT ▪ Caleg DPRD Provinsi 2004, 2009, 2014
Maria Saku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang 2009-2014 ▪ Mantan ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang
Kristien Samiyati Pati, SP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPRD NTT 2014-2019 *(Petahana) ▪ Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi NTT
Rambu K. A. Praing, S.Farm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendatang baru dunia politik
Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendatang baru dunia politik
Yeni Veronika, SH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPRD NTT 2014-2019 *(Petahana) ▪ Ketua PKK Kabupaten Manggarai 2015-2020
Jimur Siena Katrina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurus DPP Partai PAN
Angela Mercy Piwung, SH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPRD NTT 2009-2018 *(Petahana)
Ana Waha Kolin, SH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi NTT 3 periode (2009-2024) ▪ Pengurus PKB Provinsi NTT, Caleg 2009 dan 2014
Dr. Inche D.P. Sayuna SH,M.Hum, M.Kn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTT ▪ Anggota DPRD NTT 1999-2009 ▪ Akademisi
Ir. Emelia Julia Nomleni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten TTS ▪ Anggota DPRD NTT 2004-2014 ▪ Calon wakil gubernur NTT 2018
Reny Marlina Un, SE, MM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota DPRD NTT 2018-2019 *(Petahana) ▪ Caleg 2014 ▪ Akademisi dan praktisi pendidikan informal

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambaran di atas hendak menunjukkan bagaimana latar belakang (politik) caleg perempuan memiliki korelasi positif terhadap pencalonan mereka. Jika melihat data (lihat tabel 1), tergambar jelas latar belakang politik 12 caleg perempuan yang terpilih. Selain mereka yang sedang berstatus petahana, sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman politik yang panjang. Baik sebagai aktivis partai, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi maupun pengalaman mereka dalam jabatan lainnya.

Di dapil 8 di mana Reny terpilih misalnya, dua rekan perempuan yang berbeda partai juga terpilih. Sehingga dari 6 kursi yang diperebutkan 3 orang perempuan

berhasil terpilih. Keduanya adalah Emilia J. Nomleni dan Inche D.P. Sayuna yang merupakan 'pemain lama' dengan latar belakang politik yang kuat. Hal ini senada dengan temuan Prihatini (2019) bahwa keterpilihan perempuan sangat terkait pengalaman dan jabatan politik mereka.

Dua diantara 12 orang tersebut memang pendatang baru dalam politik (Rambu K. A. Praing dan Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka). Keduanya masih sangat muda dan baru menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S-1) dari perguruan tinggi setempat. Namun keterpilihan mereka tak lepas dari sosok berpengaruh di belakang mereka. Rambu K. A. Praing, merupakan putri dari Chris Praing, seorang birokrat dari kalangan bangsawan yang berpengaruh kuat dalam politik lokal di Sumba Timur. Chris Praing merupakan salah satu calon bupati pada pilkada Sumba Timur 2020 yang cukup diperhitungkan. Sementara itu Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, adalah putri dari ketua partai Perindo di Sumba Barat Daya yang juga merupakan pengusaha lokal. Ia telah mendukung putrinya secara luar biasa dengan modal finansial dan mesin partai. Keterpilihan keduanya juga menjelaskan secara baik bagaimana mereka tak lepas dari sosok maskulin dan jaringan patronase di belakang mereka.

Para caleg perempuan membutuhkan usaha dan waktu yang tidak sedikit untuk mengkonsolidasikan dukungan dalam pencalonan mereka. Jaringan kekerabatan menjadi modal utama Reny meraup suara yang signifikan di kampung halamannya di Amanuban, TTS. Ia menghabiskan waktu sekitar 6 bulan secara intensif untuk mengunjungi pemilih. Akumulasi dukungan ibarat bola salju, 200 lebih titik pertemuan dari kampung ke kampung dilewati. Pengalaman yang sama juga dilewati oleh Mercy dan Siena yang menghabiskan waktu sekitar 8 bulan secara intensif untuk bersosialisasi. Siena misalnya bersosialisasi di 400 lebih titik pertemuan dengan pemilih.

Nomor Urut, Strategi, Biaya, dan Patronase

Nomor urut menunjukkan pengaruh yang penting bagi pencalonan perempuan, sebagaimana dalam studi Prihatini (2018). Studi yang dilakukan oleh Anna Margret, dkk (2014) menunjukkan hal yang sama bahwa calon yang ditempatkan pada nomor urut kecil pada daftar calon memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terpilih. Hal tersebut dikonfirmasi dalam studi ini bahwa mayoritas yang terpilih berada pada nomor urut 1 (8 orang), sisanya berada pada nomor urut 2, 3, 4 dan 5. Hampir

dipastikan mereka yang mendapat nomor urut 1 adalah petahana dan atau pengurus teras di partai politik.

Tabel 2 Caleg Perempuan Terpilih DPRD NTT, Nomor Urut dan Perolehan Suara

Nama Caleg	Dapil	Nomor Urut	Partai	Perolehan Suara
Adoe Yuliana Elisabeth S.Sos	1	1	PDIP	4.149
Maria Saku	2	1	Perindo	4.256
Kristien Samiyati Pati, SP	3	1	Nasdem	12.317
Rambu K. A. Praing, S.Farm	3	2	PAN	11.771
Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka	3	3	Perindo	4.524
Yeni Veronika, SH	4	1	PAN	22.930
Jimur Siena Katrina	4	4	PAN	16.354
Angela Mercy Piwung, SH	5	5	PKB	7.676
Ana Waha Kolin, SH	6	1	PKB	6.282
Dr. Inche D.P. Sayuna SH,M.Hum, M.Kn	8	1	Golkar	13.096
Ir. Emelia Julia Nomleni	8	1	PDIP	15.407
Reny Marlina Un, SE, MM	8	1	Demokrat	8.538

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Sistem pemilu yang kompleks dan multi partai tentu memberikan kesulitan tersendiri bagi para caleg terutama perempuan. Persoalannya ialah adanya ketidaksetaraan dalam aspek pendidikan politik pemilih. Sumber persoalan tersebut ialah tingkat literasi yang rendah dari sebagian besar masyarakat dan minimnya akses terhadap sosialisasi dan informasi politik (seperti pemilu). Kondisi ini menyebabkan banyak pemilih tidak memperoleh informasi yang cukup soal teknis pelaksanaan pencoblosan, misalnya bagi pemilih yang buta aksara, difabel, lanjut usia dan karena faktor lain tidak dapat menyalurkan hak pilih dengan baik. Maka sosialisasi pencoblosan dan teknis pelaksanaannya di tempat pemungutan suara (TPS) biasanya dilakukan oleh para caleg dengan alat peraganya masing-masing.

Dengan demikian posisi nomor urut menjadi penting. Para caleg mengakui bahwa pemilih mengalami kebingungan. Ragam partai politik dan banyaknyanama caleg dalam daftar, termuat dalam satu kertas suara yang sama tanpa ada foto pribadi caleg. Maka bagi pemilih yang buta aksara (tidak bisa membaca) termasuk buta warna akan kesulitan menemukan letak kolom partai dan nama calon dalam daftar. Tentu saja caleg dengan nomor urut kecil lebih mudah ditemukan. Selain itu butuh penjelasan lebih detail apabila nama panggilan yang familiar bagi sang caleg berbeda dari nama lengkap yang tertera dalam daftar caleg (Wawancara Lily Adoe, 5 Februari 2020). Selain nomor urut caleg dalam daftar calon, nomor urut partai juga dianggap mempermudah

dalam sosialisasi. Hal ini diungkapkan Mercy, yang partainya (PKB) mendapat nomor urut satu pada pemilu 2019. Sehingga kolom daftar caleg berada pada urutan pertama baris pertama. Hal itu terasa memudahkannya dalam sosialisasi.

Untuk terpilih atau meraih suara yang signifikan, nomor urut kecil dan pengalaman politik tentu saja bukan jaminan. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam meraih dukungan pemilih. Selain pentingnya memiliki basis yang jelas seperti jaringan personal dan jaringan kekerabatan (*kinship networking*), sebagai caleg diperlukan kerja keras untuk meyakinkan pemilih. Reny Marlina Un misalnya memfokuskan pendekatan *door to door* (rumah ke rumah) dan lebih banyak bergerak pada malam hari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *silent strategy*, untuk menghindari pergerakan pesaing. Reny menghindari pertemuan terbuka yang menghadirkan banyak orang untuk menghindari anggapan lawan bahwa ia pesaing yang berat. Cara yang tidak berbeda dilakoni Lily dengan *door to door* menjadi carayang murah dan efektif. Ia juga dibantu oleh struktur (pengurus) partai PDIP di dapilnya yang turut mensosialisasikan dirinya.

Sebagai caleg perempuan tak kurang kampanye negatif dari pesaing laki-laki yang diarahkan kepada mereka. Isu yang muncul adalah etnisitas dan kapasitas politik mereka sebagai perempuan. Layaknya perempuan pada umumnya yang dianggap hanya cocok untuk urusan domestik saja. Para caleg perempuan ini juga pada akhirnya tidak begitu menonjolkan isu perempuan dalam kampanye mereka. Mercy sudah dua periode sebagai anggota DPRD menyangsikan bahwa janji politik terhadap isu perempuan akan dapat diwujudkan melalui agenda politik di lembaga legislatif. Jumlah perempuan yang minim menyulitkan untuk mengarusutamakan agenda perempuan dalam isu kebijakan dan anggaran. Hal ini membuat Mercy dan perempuan yang lain tidak bicara spesifik isu perempuan dalam kampanye mereka (wawancara Angela Mercy Piwung, 5 Februari 2020) Mereka sebagaimana caleg laki-laki memunculkan isu terkait kebutuhan konkret warga dan manfaat langsung yang bisa diterima warga jika memilih mereka.

Meski terlibat dalam persaingan politik yang tidak mudah, para caleg perempuan ini tidak membentuk tim sukses yang berstruktur hierarkis atau yang memiliki fungsi khusus. Bagi mereka hal itu membutuhkan biaya yang besar. Mereka memilih untuk turun langsung bertemu pemilih ditemani suami atau tim kecil yang senantiasa mendampingi mereka.

Reny memilih untuk tidak membentuk tim sukses. Ia punya pengalaman buruk saat pemilu 2014. Banyak yang menawarkan diri menjadi tim sukses atau relawan.

Selain mereka meminta biaya operasional yang tidak sedikit juga diam-diam menerima calon lain untuk mendapat bayaran. Istilah 'tim sukses', 'relawan' dalam Aspinall dan Sukmajati (2015) disebut broker. Mereka mengambil peran *intermediary* (perantara) antara caleg dan pemilih. Praktek broker seperti ini nampak dalam temuan Aspinall (2014). Istilah lokal yang sering dikeluhkan para caleg adalah bahwa tim mereka sering 'bermain dua kaki'. Karena itu para caleg membutuhkan biaya besar, untuk menjaga peluang mereka dan mengantisipasi kalau-kalau timnya tidak bekerja.

Perkara biaya politik dikeluhkan oleh mayoritas caleg. Menyerentakkan pileg dan pilpres pada Pemilu 2019 yang salah satunya untuk menghemat biaya politik, tak berdampak bagi para caleg. Para caleg tetap membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit dalam pencalonan mereka. Dalam kampanyenya di dapil 4, Siena misalnya menghabiskan 1 Miliar lebih untuk seluruh biaya politiknya. Biaya ini terbilang besar, karena kualitas persaingan yang juga tinggi. Siena bersaing dengan petahana yang juga rekan separtainya Yeni Veronika. Yeni menjadi juara di dapilnya pada pemilu 2014 dengan perolehan 21.300 suara. Tak kurang dari itu pada pemilu 2019 Yeni menjadi juara bertahan dengan meraup 22.930 suara. Akumulasi suara partai yang cukup signifikan membuat PAN mendapat dua kursi. Siena memperoleh kursi kedua untuk PAN dengan perolehan suara 16.350. Pesaing Siena dari lintas partai yang berbeda juga terbilang kuat, 5 petahana kemudian berhasil terpilih kembali.

Siena mengisahkan bagaimana biaya yang besar tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional, makan dan minum untuk pertemuan dan perlunya tindakan untuk 'membuang granat' dalam istilah Siena yang dapat dipahami sebagai pemberian bantuan kepada pemilih. Hal ini terpaksa dilakukan, mengingat lawan tradisional (laki-laki) kerap melakukan praktik patronase di basis pemilih yang sama. Praktik ini seringkali mengikuti logika pasar (bdk. Aspinall, et.al 2017).

"Kalau yang pakai babi 5 juta, kalau yang makan ikan, 2,5 Juta. Saya udah kali bagi (hitung) semua itu. Terus saya kalau dimana lawan saya pernah janji sesuatu, maka saya buang granat situ. Begitu politik, saya harus buang granat." (Wawancara Siena Katariana, 5 Februari 2020).

Mercy mengakui hal yang sama. Mereka yang memperoleh suara jauh lebih banyak di atas dirinya adalah calon-calon yang mengandalkan uang. Ia merasa beruntung sebagai

petahana. Biaya yang ia keluarkan tidak begitu besar, atau sekitar 130 juta untuk seluruh biaya (pengadaan alat peraga dan operasional kampanye). Mercy mengisahkan bahwa investasi sosial atau bantuan kepada konstituen telah ia lakukan jauh sebelum masa pemilu yaitu saat ia aktif sebagai anggota DPRD. Ia mengakui bahwa merawat basis pemilihnya tidaklah mudah. Banyak permintaan bantuan dari pemilih yang harus ia penuhi. Bahkan biaya untuk bantuan tersebut sering keluar dari uang pribadi, seperti bantuan untuk bahan (material) bangunan dan bantuan uang kuliah anak dari konstituen. Bagi Mercy, seorang petahana janganlah pelit jika ingin bertahan lebih dari satu periode. Mercy pun mengakui ia tak punya apa-apa (tabungan) dan tiap kali menjelang pemilu selalu kredit (meminjam uang dari Bank). Penghasilannya sebagai anggota DPRD telah banyak habis ke tangan konstituen yang kemudian ia anggap sebagai investasi sosial. Meski demikian bantuan-bantuan kepada konstituen itu sama sekali tidak menjamin bahwa mereka pasti akan mendukung di dalam pemilu nantinya. Meski demikian para caleg meyakini bahwa 'kebaikan' tersebut akan menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan di hari pencoblosan.

Tak berbeda dengan Mercy, Reny di TTS menghadapi permintaan bantuan konstituen yang meningkat menjelang pemilu. Ia mengakui harus mengeluarkan biaya pribadi yang besar. Bantuan kepada mereka yang meninggal seperti bantuan kendaraan ambulance dan peti mayat merupakan permintaan yang datang dari konstituen. Ia juga membantu pembangunan beberapa rumah ibadat sebelum pemilu. Pada pemilu 2019, Reny mengabdikan 400 juta lebih untuk seluruh biaya kampanye hingga hari H pemilihan.

Di Kota Kupang, Lily tak begitu menghabiskan banyak biaya untuk sosialisasinya. Ia mengakui menghabiskan sekitar 75 juta untuk sosialisasinya. Ia dimudahkan karena luas dapil tak begitu besar sebagaimana dapil lain yang meliputi beberapa kabupaten. Ia mengakui bahwa para pesaingnya menggunakan praktik pertukaran material (sumbangan) dengan harapan memperoleh suara. Bantuan bantuan seperti tenda, kursi, tanah urukan (sertu) menjadi contoh-contoh pendekatan material untuk mendapatkan suara pemilih di dapilnya.

Gambaran di atas, merupakan bentuk-bentuk patronase yang umum dalam politik elektoral di Indonesia sebagaimana dirangkum Aspinall dan Sukmajati (2015). Tentu hal ini akan sangat berpengaruh besar bagi caleg perempuan. Para caleg perempuan harus dapat menyesuaikan atau menyasati keadaan ini agar menjaga

peluang mereka tetap ada. Tidak hanya pemilih di pedesaan yang cenderung menuntut patronase, pemilih diperkotaan juga menunjukkan kecenderungan yang sama, meski skalanya berbeda. Ini menjelaskan mengapa pemilih yang kurang terdidik dan miskin akan cenderung menuntut patronase (Shin, 2015). Jadi eksistensi dan kemanfaatan seorang caleg adalah ketika yang bersangkutan membalas suara pemilih atau dukungan konstituen dengan bantuan material yang dapat secara nyata dirasakan konstituen. Para caleg ini menghindari penilaian konstituen yang dapat menjuluki mereka sebagai caleg yang pelit, atau lupa konstituen ketika sudah terpilih.

Jual Beli Suara dan Strategi Pengawalan

Betapa rumit untuk menjadi caleg terpilih ditengah praktik patronase. Belum lagi menjaga relasi dengan pemilih dan perlunya hubungan klientelismeyang awet dengan pendukung utama atau tim (broker) di dapil. Hari H pemilihan merupakan saat yang penting dan terkadang kritis bagi umumnya caleg. Inilah saat di mana lonjakan politik uang terjadi secara masif.

Para caleg perempuan ini memerlukan usaha yang lebih keras untuk memastikan peluang mereka tidak disabotase oleh pesaing, terutama laki-laki. Lily mengakui bahwa perempuan tidak kalah energi dari para laki-laki dalam bersosialisasi. Namun kesulitan terbesar adalah dalam mengawal suara agar tetap utuh sampai pada perhitungan tingkat terakhir.

“Kalau dibilang laki-laki sudah berlari, yah kita harus 10 kali lebih kuat kejar mereka, dengan strategi yang bagaimana, itu kan harus punya strategi yang lebih. Tetapi biasanya, soal kerja (mencari suara), yang saya alami soal sosialisasi, perempuan (kami) sangat mampu. Tapi soal mengawal suara diperhitungan terakhir pasti kami selalu kesulitan, karena pada saat itu dibutuhkan biaya yang sangat besar” (Wawancara Lily Adoe 5 Februari 2020).

Di TTS, Reny punya pengalaman buruk dalam perhitungan suara di hari H. Ia mengalami kehilangan suara yang cukup banyak saat Pemilu 2014. Reny membutuhkan usaha keras untuk mendapatkan kembali suaranya yang sengaja dihilangkan petugas pemilihan dalam tahap rekapitulasi suara di tingkat desa dan kecamatan. Reny pun memobilisasi tim pendukung untuk ‘mengancam’ penyelenggara hingga mereka membetulkan angka perolehan suara yang sebelumnya dikurangi.

Praktik kecurangan perhitungan atau rekapitulasi suara marak dalam pemilu di Indonesia. Praktik ini muncul karena adanya keinginan yang kuat dari caleg untuk

terpilih sementara ada peluang mencapainya melalui manipulasi suara. Hal ini sangat dimungkinkan dengan adanya peluang atau ada kesanggupan penyelenggara untuk melakukannya dengan bayaran tertentu. Relasi timbal balik ini layaknya mekanisme penawaran dan permintaan (*supply and demand*) dalam pasar bebas. Dalam banyak kasus penyelenggara memulai lebih dulu dengan menawarkan jasa untuk meningkatkan suara caleg secara instan dengan imbalan biaya tertentu. Reny mengisahkan pengalamannya:

“Tapi waktu itu (pemilu 2014) *katong* (kita) pendatang (baru) jadi *sonde* (tidak pernah tahu bahwa ternyata, jual beli suara itu ada. Karena sebelum coblos dari KPPS dong su (mereka sudah) pernah tawar, ‘ibu mau suara berapa, ibu siapkan dana sekian’. (Wawancara Reny Marlina Un 27 Februari 2020)

Untuk menghindari resiko kehilangan suara pada Pemilu 2019, Reny pun akhirnya menghabiskan biaya besar untuk pengawalan suara. Selain harus ikut patungan membiayai saksi resmi dari partainya, ia juga harus menyiapkan saksi cadangan (saksi lapis 2) yang diberi tanggung jawab untuk mengawal proses pencoblosan hingga perhitungan selesai. Jumlah saksi pelapis ini 2 sampai 3 orang tergantung karakter wilayah. Reny menghabiskan 200 juta lebih di hari H pemilihan untuk membiayai saksi cadangan terutama yang ditempatkan di basis utama.

Sistem pemilu yang masih memungkinkan kecurangan tentu saja tidak ramah bagi perempuan. Caleg perempuan pada umumnya lemah dalam pengawalan suara. Manipulasi suara bisa dilakukan oleh rekan di internal partai atau pesaing lintas partai. Mereka yang tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengawalan tambahan dalam proses perhitungan suara akan rentan menjadi korban kecurangan. Saksi tambahan tentu saja mayoritas terdiri dari laki-laki. Mereka yang dipastikan tidak terikat dengan urusan rumah (domestik), untuk mengawal perhitungan suara yang membutuhkan energi dan memakan waktu lama. Pengalaman dalam Pemilu serentak 2019, perhitungan suara tidak bisa diselesaikan dalam satu hari dan harus melewati tahap rekapitulasi berjenjang yakni dimulai dari TPS hingga tingkat Provinsi. Situasi ini menuntut usaha caleg perempuan dalam mengawal suaranya. Mereka memerlukan strategi-strategi politik yang identik dengan maskulinitas untuk mengantisipasi kecurangan. Mereka membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk membiayai saksi/relawan yang mengawal perhitungan suara. Tanpa itu sulit bagi seorang caleg perempuan untuk terpilih.

PENUTUP

Usaha meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif masih merupakan jalan terjal yang panjang. Hambatan dari sistem pemilu (struktural) merupakan tantangan yang lebih nyata dari pada hambatan kultural. Sistem pemilu yang memicu patronase telah menciptakan banyak hambatan berarti bagi perempuan. Kebijakan afirmasi meningkatkan pencalonan perempuan, tetapi tidak cukup meningkatkan keterpilihan perempuan. Sejumlah perempuan dapat memiliki latar belakang politik, pengalaman dan nomor urut kecil yang dapat menunjang pencalonan mereka. Tetapi praktik patronase dan kekuatan uang dapat menjadi *game changer* (pengubah permainan). Kandidat perempuan berada pada pilihan yang sulit. Mereka perlu menyesuaikan dengan taktik permainan umum yang banyak dilakukan lawan tradisionalnya (laki-laki). Pencalonan perempuan tak luput dari bayang-bayang maskulinitas. Karena itu mereka akhirnya mengesampingkan agenda politik perempuan dalam kampanye mereka. Tantangan politik patronase masih bisa diatasi kandidat perempuan petahana atau kandidat dengan modal finansial, jaringan personal, organisasional dan kekerabatan yang juga memadai. Sementara itu kandidat perempuan pada umumnya dengan kategori pendatang baru atau dengan keterbatasan sumber daya akan sangat sulit lolos.

Sistem pemilu memiliki dampak terhadap representasi perempuan. Ke depan dibutuhkan sistem pemilu yang lebih ramah pada perempuan. Kebijakan yang diperlukan misalnya caleg perempuan wajib menempati nomor urut kecil dalam daftar atau kebijakan lain yang melampaui *zipper system*. Lebih jauh sistem proporsional daftar terbuka seperti saat ini di Indonesia perlu dievaluasi serius.

REFERENSI

- Allen, N.W. 2015. Clientelism and the personal vote in Indonesia, *Electoral Studies* 37:7385. DOI: 10.1016/j.electstud.2014.10.005.
- Aminuddin, M. Faishal dan Natasha Hassan Attamimi. 2019. From Retail to Grocery: Money Politics in 2014 Indonesian Legislative Election. *Indonesian Political Science Review* 4 (1), January 2019, pp. 99-120 DOI: <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.12609>
- Aspinall, E. & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov-UGM

- Aspinall, Edward. 2013. A Nation In Fragments Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies* Volume 45, 2013 - Issue 1. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>
- Aspinall, Edward. 2014a. When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, And Electoral Politics In Indonesia. *Critical Asian Studies*, Volume 46, 2014 - Issue 4. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Aspinall, Edward. 2014b. Parliament and Patronage. *Journal of Democracy*, Volume 25, Number 4, October 2014, pp. 96-110 (Article), Published by Johns Hopkins University Press. DOI: 10.1353/jod.2014.0070
- Aspinall, et.al. 2017. Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic and Effectiveness. *Journal of East Asian Studies* 17 (2017), 1-27. DOI:10.1017/jea.2016.31
- Dettman, Sebastian, et.al. 2017. Incumbency Advantage and Candidate Characteristics in Open-list Proportional Representation Systems: Evidence from Indonesia. *Electoral Studies*. DOI: 10.1016/j.electstud.2017.06.002
- Halimatusa'diyah, Lim.2019. "Semakin banyak perempuan di DPR, tapi riset ungkap kehadiran mereka mungkin tidak signifikan" <https://theconversation.com/semakinbanyak-perempuan-di-dpr-tapi-riset-ungkap-kehadiran-mereka-mungkin-tidaksignifikan-125013>
- Hillman, Ben. 2017. The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, DOI: 10.1080/00472336.2017.1368092
- Johnson-Myers, Tracy-Ann. 2017. *The Mixed Member Proportional System: Providing Greater Representation for Women? A Case Study of the New Zealand Experience*. Switzerland: Springer Nature
- Jovani, Audra. 2018. Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada* Vol.1 No.1, Juni 2018, 75-93
- Margret, Anna, dkk. 2014. *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014*. Depok: Puskapol UI Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: KPG
- McCann, Joy. 2013. Electoral quotas for women: an international overview. *Analysis and policy observatory*. Research Paper, 2013-14. <https://apo.org.au/node/36334>
- Paxton, Pamela, Melanie M. Hughes & Matthew A. Painter II. 2010. Growth in women's political representation: A longitudinal exploration of democracy, electoral system and gender quotas. *European Journal of Political Research* 49: 25-52, 2010. DOI: 10.1111/j.1475-6765.2009.01886.x
- Prihatini, Ella S. 2018a. On The Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers. *Asian Social Science*; Vol. 14, No. 5; 2018 DOI:10.5539/ass.v14n5p48
- Prihatini, Ella S. 2018b. Indonesian Young Voters: Political Knowledge and Electing Women into Parliament. *Women's Studies International Forum (Journal)*, Published by Elsevier (www.elsevier.com/locate/wsif). <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.015>

- Prihatini, Ella S. 2019a. Women Who Win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position. *Women's Studies International Forum (Journal)*, Published by Elsevier (www.elsevier.com/locate/wsif)
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.10.003>
- Rosenfield, Sarah Shair. 2012. The Alternative Incumbency Effect: Electing Women Legislators in Indonesia. *Women's Studies International Forum (Journal)*, Published by Elsevier (www.elsevier.com/locate/wsif). DOI:10.1016/j.electstud.2012.05.002.
- Prihatini, Ella S. 2019b. Women's Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia. *Women's Studies International Forum (Journal)*, Published by Elsevier (www.elsevier.com/locate/wsif)
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.001>
- Shin, Jae Hyeok. 2015. Voter Demands For Patronage: Evidence From Indonesia. *Journal of East Asian Studies* 15 (2015), 127-151
- Thames, Frank C. 2016. Understanding the Impact of Electoral Systems on Women's Representation. *Politics & Gender*, (2016), page 1 of 26
DOI:10.1017/S1743923X16000325